

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEJAR PAKET C DI PKBM NEGERI 23 JAKARTA PUSAT

Nur Nabila Aulia^{1*}, Muhamad Cholifihani², Deddy S. Bratakusumah³, Siti Mariam⁴

^{1,2,3,4} Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

*Korespondensi: nurnabilaa@898@gmail.com

ABSTRAK

Tingginya jumlah anak putus sekolah merupakan masalah besar yang menghambat kemajuan negara. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan program kejar paket C di PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat, berdasarkan masalah tersebut. Fokus penelitian bukan mengevaluasi kebijakan secara keseluruhan; sebaliknya, ia berfokus pada cara kebijakan diterapkan di tingkat pelaksanaan. Selain itu, penelitian ini menemukan komponen yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan program. Empat faktor utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi Edward III. Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, observasi, dokumentasi, dan wawancara digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun ada beberapa masalah dalam penyebaran informasi, komunikasi antara pemerintah, pengelola PKBM, dan siswa sangat baik.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, Kejar Paket C, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

ABSTRACT

The high number of school dropouts is a major problem that hinders the progress of the country. This study focuses on the implementation of the package C catch-up program policy at PKBM Negeri 23 Central Jakarta, based on this problem. The focus of the study is not to evaluate the policy as a whole; instead, it focuses on how the policy is implemented at the implementation level. In addition, this study finds components that influence the success and failure of the program. The four main factors discussed in this study are communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. This study uses Edward III's implementation theory. Qualitative with a descriptive approach, observation, documentation, and interviews are used. The results of the study indicate that, although there are some problems in the dissemination of information, communication between the government, PKBM managers, and students is very good.

Keywords: Policy implementation, Package C pursuit, Community Learning Activity Center (PKBM)

A. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran krusial dalam kehidupan manusia karena menjadi fondasi utama bagi pembangunan individu, khususnya dalam membentuk pola pikir, sikap kepribadian, kemampuan berbahasa, serta kontribusi terhadap kehidupan sosial (Oktaviani, 2023). Namun pada kenyataan yang ada di Indonesia ini, fenomena pendidikan memiliki berbagai dinamika yang mencerminkan kompleksitas tantangan dan peluang. Ada beberapa fenomena penting dalam sistem pendidikan di Indonesia diantara seperti ketimpangan kualitas pendidikan yang cukup signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, kesetaraan akses masih mengalami berbagai hambatan terutama baik kelompok marginal atau kelompok miskin, kurikulum pendidikan yang terus berubah hal ini membutuhkan adaptasi yang tidak mudah bagi siswa, masalah guru ataupun tenaga pendidik masih rendahnya guru yang berkompeten dan berdedikasi, dan masalah infrastruktur yang kurang memadainya sarana dan prasarana.

Menurut Badan Pusat Statistik, usia sekolah di Indonesia menjadi beberapa golongan berdasarkan jenjang pendidikan, berikut klasifikasi usia sekolah, usia PAUD 0-6 tahun, SD 7-12 tahun, SMP 13-15 tahun, SMA 16-18 tahun, dan usia pendidikan tinggi 19 tahun keatas (BPS, 2024).

Jenjang Pendidikan	Usia (Tahun)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0 – 6
Pendidikan Dasar	7 – 12
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	13 – 15
Sekolah Menengah Atas	16 - 18

(SMA)	
Pendidikan Tinggi	19 ke atas

Sumber: Badan Pusat Statistik

Masih banyak jumlah anak putus sekolah, menjadi permasalahan di negara ini yang tentunya dapat menghambat kemajuan dan daya saing bangsa. Data jumlah siswa putus sekolah terutama di Provinsi DKI Jakarta berjumlah 45.950 dari jenjang Sekolah Dasar sampai tingkat Sekolah Menengah Atas (Kemendikbud, 2024). Anak putus sekolah kejar paket C di PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat dalam 5 tahun terakhir, pada tahun 2021 sebanyak 107 siswa, tahun 2022 sebanyak 112 siswa, tahun 2023 sebanyak 111 siswa, tahun 2024 sebanyak 114 siswa, dan tahun 2025 sebanyak 103 siswa.

Masih banyak jumlah anak putus sekolah, menjadi permasalahan di negara ini yang tentunya dapat menghambat kemajuan dan daya saing bangsa. Data jumlah siswa putus sekolah terutama di Provinsi DKI Jakarta berjumlah 45.950 dari jenjang Sekolah Dasar sampai tingkat Sekolah Menengah Atas (Kemendikbud, 2024). Anak putus sekolah kejar paket C di PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat dalam 5 tahun terakhir, pada tahun 2021 sebanyak 107 siswa, tahun 2022 sebanyak 112 siswa, tahun 2023 sebanyak 111 siswa, tahun 2024 sebanyak 114 siswa, dan tahun 2025 sebanyak 103 siswa.

Berdasarkan data diatas , permasalahan utama adalah bagaimana implementasi kebijakan program kejar paket C dilaksanakan di PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat ? apa saja faktor determinan yang mempengaruhi efektivitas maupun keterbatasan dalam pengimplementasian kebijakan program paket C di PKBM

Negeri 23 Jakarta Pusat ?. Salah satu pendekatan yang relevan untuk implementasi kebijakan adalah teori implementasi kebijakan Edward III, keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel penting, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi kelembagaan.

Dalam dokumen Peraturan Presiden No 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, sektor pendidikan menjadi sebagian prioritas utama pembangunan nasional. Fokus kebijakan diarahkan pada perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan diseluruh jenjang, serta percepatan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. Dalam rangka tercapainya tujuan yang dimaksud, pemerintah mengupayakan penanggulangan terhadap permasalahan anak tidak sekolah sebagai bagian dari metode dalam peningkatan partisipasi pendidikan (Noviani *et al.*, 2023). Menurut UU No 20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jalur pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan formal, nonformal dan informal (Rajaloe, 2023). PKBM yang memiliki kemampuan menawarkan program pendidikan yang sama ialah salah satu cara yang bisa dilakukan guna mengurangi bertambahnya anak serta masyarakat yang putus sekolah (Mulyati, 2022).

Hadirnya Pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan adanya program paket kesetaraan berperang penting dalam menanggulangi angka putus sekolah melalui beberapa aspek utama, pertama, program ini secara khusus dirancang untuk mengurangi jumlah peserta didik yang tidak menyelesaikan pendidikan formal. Kedua,

Program ini memberikan alternatif pendidikan yang fleksibel. Ketiga, tujuannya ialah menjamin akses terhadap penyelesaian pendidikan yang berkualitas bagi anak – anak yang mempunyai kendala dalam menempuh pendidikan (Lidy, 2024). Implementasi kebijakan program kejar paket C tidak terlepas dari bermacam – macam tantangan, baik dari sisi pengelola PKBM, ketersediaan sumberdaya maupun Struktur birokrasi kelembagaan yang ada. Agar kebijakan ini berfungsi dengan baik serta menghasilkan kegunaan yang maksimal, maka perlu adanya penelitian lebih dalam yang berkomunikasi sukses tidaknya tindakan kebijakan tersebut.

Riset yang dilakukan untuk mengembangkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Seputra, 2024). Penelitian sebelumnya terkait implementasi kebijakan program paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng dipengaruhi oleh empat variabel yaitu Komunikasi, sumberdaya, catatan, dan Struktur birokrasi kelembagaan. Ketidaksamaan riset yang dijalankan ini dengan riset sebelumnya ialah terletak di lokasinya yakni di Jakarta Pusat.

Tujuan penelitian yaitu: Untuk mengetahui bagaimana Komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi kelembagaan yang mempengaruhi implementasi kebijakan program kejar paket C di PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan program kejar paket C di PKBM. Harapan penelitian secara keseluruhan adalah untuk berkontribusi pada pembentukan kebijakan pendidikan nonformal di Indonesia khususnya dalam konteks program tersebut yang lebih inklusif serta efektif.

B. METODE PENELITIAN

Materi dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini dijalankan dengan metode kualitatif yang mana memakai dengan cara pendekatan secara deskriptif. Tujuannya adalah untuk menyatukan dan menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Harapan dari riset yang dijalankan ialah meningkatkan pemahaman kita tentang program paket C di PKBM Negeri 23 Jakarta pusat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali informasi secara mendalam mengenai fenomena yang diteliti (Ishtiaq, 2019).

Menurut Haven & Grootel (2019:232) Riset dengan jenis ini sering dipergunakan dalam keadaan yang alamiah sebagai sumber informasinya, baik secara lisan maupun tertulis, pengambilan foto, video atau jenis rekaman perilaku lainnya. Jenis kualitatif deskriptif sering digunakan dalam kontekstual untuk mengeksplorasi secara mendalam pandangan dan pengalaman individu terhadap suatu fenomena (Fitra, 2024). Dalam hal ini peneliti menggunakan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisa terkait implementasi kebijakan program kejar paket C berdasarkan teori Edward III.

Prosedur Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan dan Perizinan

Peneliti terlebih dahulu mengajukan izin penelitian kepada pihak PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat dan instansi terkait. Setelah mendapatkan izin, peneliti menyusun pedoman wawancara, lembar observasi, serta dokumen yang akan digunakan dalam pengumpulan data.

2. Pengumpulan Data

a. **Wawancara** dilakukan secara langsung dengan responden menggunakan pedoman

wawancara semi-terstruktur. Seluruh wawancara direkam dengan izin responden untuk memastikan akurasi data.

b. **Observasi** dilakukan dengan mencatat kondisi infrastruktur, proses pembelajaran, dan interaksi antara tenaga pendidik dan peserta didik dalam program Kejar Paket

c. **Dokumentasi** mencakup analisis terhadap regulasi, laporan internal PKBM, serta kebijakan terkait program Kejar Paket C yang diterapkan di PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat.

3. Validasi Data

Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data yang diperoleh dari berbagai sumber (Denzin, 2012). Hasil wawancara dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi guna mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat.

Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik yang dikembangkan oleh Braun & Clarke (2006). Proses analisis meliputi:

a. **Transkripsi dan Organisasi Data:** Hasil wawancara ditranskripsikan secara verbatim, sementara catatan observasi dan dokumentasi dikategorikan berdasarkan aspek yang diteliti.

b. **Pemberian Kode:** Setiap data dikodekan sesuai dengan kategori utama dalam teori implementasi kebijakan Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

c. **Identifikasi Tema:** Kategori yang telah dibuat selanjutnya

dianalisis untuk menemukan pola dan hubungan antar variabel.

d. **Interpretasi dan Kesimpulan:**

Hasil analisis tematik ditafsirkan berdasarkan teori implementasi kebijakan serta kondisi nyata yang ditemukan di lapangan.

- e. Dengan metode penelitian yang terstruktur ini, diharapkan hasil penelitian dapat diulang oleh peneliti lain dan memberikan pemahaman mendalam terkait implementasi kebijakan program Kejar Paket C di PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Program Paket

Program Kejar Paket C ialah jenis pendidikan non-formal yang ditawarkan oleh berbagai lembaga pendidikan masyarakat, salah satunya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Negeri 23 Jakarta Pusat. Tujuan Program Kejar Paket C adalah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi mereka yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal di SMA atau SMK. Selain itu, program ini dapat membantu mereka yang ingin memperoleh ijazah setara SMA untuk meningkatkan kesempatan kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Program Kejar Paket C melibatkan banyak orang, termasuk dinas pendidikan, kepala PKBM, tenaga pendidik, dan siswa yang terdaftar. Dinas pendidikan bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan mengawasi pelaksanaan program, sementara PKBM bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan belajar mengajar secara langsung. Para pendidik bertanggung jawab untuk menyediakan bahan pelajaran dan membantu siswa

menyelesaikan program. Sebaliknya, siswa program ini berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pekerja, ibu rumah tangga, hingga remaja putus sekolah yang ingin lanjut sekolah.

Implementasi Kebijakan Menurut Teori Edward III

Komunikasi

Di PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat, keberhasilan Program Kejar Paket C sangat bergantung pada Komunikasi. Komunikasi dalam konteks ini mencakup interaksi antara dinas pendidikan, kepala dekolah PKBM, tenaga pendidik, dan siswa yang terlibat dalam program. Efektivitas program sangat dipengaruhi oleh bagaimana informasi tentang kebijakan, jadwal pembelajaran, dan persyaratan administratif disampaikan dengan jelas. Setiap orang dapat memahami peran mereka dengan baik ketika komunikasi berjalan dengan baik, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Namun, miskomunikasi dapat mengganggu pelaksanaan program, menyebabkan kebingungan bagi peserta program, keterlambatan pelaksanaan, dan ketidakjelasan prosedur.

Pemerintah daerah bekerjasama dengan dinas pendidikan untuk mensosialisasikan program ini melalui media sosial, seminar, dan pertemuan komunitas. Berdasarkan hasil dari responden yang diwawancarai sebagian besar siswa mengetahui program ini melalui rekomendasi dari keluarga, tetangga atau dari teman mereka, sebagian siswa lainnya mengetahui melalui informasi ini dari media sosia, web dan dari brosur PKBM. Selain itu, pelaksanaan Komunikasi antara pengelola PKBM dan tenaga pendidik dilakukan secara berkala

dalam bentuk rapat koordinasi bulanan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Namun, terdapat tantangan dalam penyebaran informasi di kalangan masyarakat yang masih kurang familiar dengan pentingnya pendidikan non-formal, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif dan berbasis komunitas.

Selain komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, komunikasi internal dalam PKBM juga menjadi aspek penting dalam keberhasilan program ini. Pengelola PKBM perlu memastikan bahwa setiap tenaga pendidik memahami kebijakan dan metode pembelajaran yang diterapkan. Pelaksanaan pelatihan bagi tenaga pengajar serta koordinasi antar guru menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan sistem komunikasi yang efektif, terutama dalam hal koordinasi antara tenaga pengajar dan peserta didik yang memiliki latar belakang serta tingkat pemahaman yang beragam.

Alur penyampaian informasi menjadi salah satu tantangan utama dalam Komunikasi program ini. Ini terkadang terjadi karena kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait. Sebagai regulator, dinas pendidikan seringkali memiliki jadwal padat dan tidak selalu memiliki kemampuan untuk melakukan supervisi secara langsung. Akibatnya, informasi tentang kebijakan terbaru harus melalui beberapa tingkatan sebelum sampai ke PKBM dan tenaga pendidik. Selain itu, komunikasi antara siswa dan guru juga sulit, terutama dalam memastikan bahwa semua siswa memahami materi pelajaran

dengan baik karena sebagian besar siswa mempunyai pemahaman yang tidak sama berasal dari berbagai latar belakang.

Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh pendekatan komunikasi yang digunakan PKBM untuk mengatasi masalah ini. Misalnya, beberapa guru telah mulai menggunakan platform digital seperti WhatsApp dan Google Classroom untuk memberikan siswa informasi tentang jadwal pelajaran dan materi pembelajaran. Dengan menggunakan media komunikasi ini, penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan efektif. Selain itu, salah satu cara untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur terbaru diterapkan dengan baik di lapangan dengan mengadakan rapat koordinasi rutin antara pihak PKBM dan tenaga pendidik.

Aspek teknis penyampaian informasi tidak hanya terkait dengan komunikasi yang baik, tetapi juga membangun komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat. Membangun rasa percaya diri dan memberikan motivasi dapat membantu siswa lebih terlibat dalam kelas. Komunikasi antara tenaga pendidik dan pihak PKBM juga harus terbuka dan berbasis solusi, sehingga setiap masalah dalam pelaksanaan program dapat diselesaikan dengan cara yang efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, tiga komponen utama diperlukan untuk komunikasi yang efektif dalam Program Kejar Paket C: kejelasan informasi, keterbukaan dalam komunikasi, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan interaksi. Meskipun masih ada hambatan dalam pelaksanaannya, berbagai pendekatan yang telah digunakan menunjukkan bahwa Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi program dan

membantu peserta mencapai tujuan mereka dalam menyelesaikan pendidikan setara SMA. Program Kejar Paket C diharapkan terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Sumber Daya

Untuk keberhasilan Program Kejar Paket C di PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat, sumber daya sangat penting. Sumber daya dalam hal ini mencakup berbagai elemen, seperti tenaga pendidik, sarana dan prasarana, dan dukungan keuangan yang diperlukan untuk menjalankan program. Untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi, diperlukan tenaga pendidik yang berkualitas. Selain itu, dua komponen utama yang mendukung keberhasilan program ini adalah ketersediaan fasilitas pembelajaran yang memadai dan jumlah dana yang cukup. Namun, dalam kenyataannya, ada banyak hambatan dalam hal ketersediaan sumber daya, yang sering menghambat kinerja program.

Tenaga pendidik dalam Program Kejar Paket C memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan materi pembelajaran dan membantu siswa menyelesaikan program dengan baik. Namun, jumlah guru yang tersedia sering kali lebih sedikit daripada jumlah siswa yang terdaftar. Hal ini berarti bahwa satu pendidik harus menangani banyak siswa pada satu waktu, dalam menyampaikan kegiatan belajar mengajar. Selain itu, para pendidik memerlukan pelatihan tambahan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajar siswa dari berbagai latar belakang yang beragam.

Anggaran juga sangat penting untuk keberlangsungan implementasi program kejar paket C di PKBM. Anggaran yang di

berikan oleh pemerintah untuk PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat sudah terperinci dengan jelas. Pemerintah bekerja sama dengan dinas pendidikan dan PKBM untuk mengelola program kejar paket C ini di PKBM agar berjalan dengan baik. Pihak PKBM pun mengalokasikan anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk bahan ajar siswa. Fasilitas yang disediakan oleh PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat memiliki fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang ber-AC, ada proyektor dan akses internet untuk mendukung pembelajaran di kelas, ada ruang perpustakaan, ruang tatap muka, ruang tatap muka, dan bahkan ada ruangan TIK untuk siswa belajar di era digital ini.

Ketersediaan modul dan bahan ajar juga menjadi perhatian dalam aspek sumber daya. Modul pembelajaran disediakan oleh pemerintah, namun dalam beberapa kasus, modul yang digunakan belum diperbarui atau tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Informasi terkait kebijakan dan teknis pelaksanaan program lebih mudah diakses oleh PKBM Negeri karena adanya jalur koordinasi yang jelas melalui Dinas Pendidikan setempat. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh PKBM Negeri telah cukup mendukung pelaksanaan program Kejar Paket C, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan secara menyeluruh namun setiap hambatan tentu ada solusinya untuk mencapai kelancaran berjalannya program kejar paket C di PKBM.

Dari sisi pendanaan, PKBM Negeri memiliki akses yang lebih stabil terhadap dana pemerintah, seperti BOS Kesetaraan

dan Dana Alokasi Khusus Non- Fisik. Pendanaan ini memungkinkan kegiatan pembelajaran berjalan lebih lancar. Selain itu, sarana dan prasarana di PKBM Negeri juga relatif lebih memadai. Sebagian besar PKBM Negeri telah memiliki gedung sendiri dan fasilitas dasar seperti ruang kelas dan perlengkapan pembelajaran.

Disposisi

Keberhasilan implementasi Program Kejar Paket C sangat dipengaruhi oleh disposisi atau sikap dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Dalam situasi ini, pendapat guru, siswa, pengelola PKBM, dan dukungan masyarakat dan pemerintah sangat penting. Misalnya, sikap positif yang ditunjukkan oleh tenaga pendidik saat membimbing siswa sangat berperan dalam meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Sebaliknya, jika tenaga pendidik tidak peduli dengan perkembangan siswa, efektivitas pembelajaran akan menurun, dan kemungkinan siswa menyelesaikan program akan lebih rendah. Oleh karena itu, keberhasilan Program Kejar Paket C sangat bergantung pada bagaimana catatan setiap individu dapat membantu program berjalan dengan baik.

Tenaga pendidik memainkan peran penting dalam menentukan kualitas pembelajaran, dan sikap mereka terhadap tugas yang diberikan akan berdampak langsung pada proses pembelajaran siswa. Guru yang berdedikasi tinggi cenderung memberikan perhatian lebih kepada siswa, memahami tantangan siswa, dan berusaha menemukan cara terbaik untuk membantu pembelajaran berjalan dengan baik. Akibatnya, pendidik harus diberi pelatihan dan pembinaan yang tidak hanya menekankan pada aspek teknis mengajar, tetapi juga untuk meningkatkan semangat

dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas mereka.

Karena sebagian besar peserta Program Kejar Paket C merupakan individu yang putus sekolah dan menghadapi berbagai tantangan dalam hidup mereka, sikap siswa juga berperan dalam keberhasilan program. Siswa tertentu sangat bersemangat untuk belajar dan menyelesaikan program, tetapi ada juga yang mengalami kesulitan untuk mempertahankan minat mereka dalam belajar karena masalah keuangan, keluarga, atau pekerjaan mereka. Untuk memastikan bahwa siswa tetap termotivasi dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan mereka, pendidik dan pengelola PKBM harus terus memberikan dorongan dan membangun lingkungan belajar yang mendukung.

Pengelola PKBM sangat penting untuk menjamin bahwa kebijakan dan prosedur program berjalan dengan baik. Pengelola yang proaktif akan lebih responsif ketika menghadapi masalah seperti kekurangan sumber daya atau kendala administrasi. Selain itu, pengelola yang sangat berkomitmen pada keberhasilan program akan lebih berusaha untuk menemukan cara baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Sikap positif dan solutif dari pengelola akan berdampak langsung pada kinerja program secara keseluruhan.

Di tingkat yang lebih luas, sikap pemerintah dan masyarakat juga sangat mempengaruhi keberlangsungan Program Kejar Paket C. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus memiliki komitmen kuat dalam memberikan dukungan, baik dalam bentuk regulasi yang jelas maupun alokasi dana yang

memadai. Jika pemerintah tidak memiliki kepedulian yang cukup terhadap pendidikan non-formal, maka program ini akan mengalami kesulitan dalam hal pendanaan dan pengelolaan. Sementara itu, dukungan dari masyarakat, terutama dalam memberikan motivasi kepada peserta program dan membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, juga sangat dibutuhkan agar siswa merasa didukung dalam menyelesaikan pendidikan mereka.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi kelembagaan yang digunakan untuk menjalankan Program Kejar Paket C memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan program dan kinerjanya. PKBM harus memiliki Struktur birokrasi kelembagaan yang jelas dan efektif untuk memperlancar program dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah diterapkan dengan baik. Sebaliknya, program dapat terhambat oleh berbagai hambatan administrasi jika sistem birokrasi terlalu kaku dan berbelit-belit. Misalnya, keterlambatan dalam pengadaan fasilitas pendidikan atau pembayaran honor tenaga pendidik dapat menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana yang membutuhkan banyak proses, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa.

Kompleksitas regulasi yang harus dipenuhi oleh PKBM untuk menerima dukungan dan dana dari pemerintah merupakan salah satu tantangan utama dalam Struktur birokrasi kelembagaan Program Kejar Paket C. Meskipun peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa anggaran digunakan dengan akuntabel dan jelas, prosesnya seringkali terlalu kompleks, yang membuat pengelola PKBM lebih terbebani untuk

mengurus administrasi. Hal ini menyebabkan pengelola menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menyusun dokumen dan laporan.

Selain itu, koordinasi antara berbagai instansi pemerintah juga menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi program ini. Program Kejar Paket C berada di bawah koordinasi berbagai lembaga, seperti Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan setempat, serta PKBM sebagai penyelenggara di tingkat daerah. Jika koordinasi antara lembaga-lembaga akan ada ketidaksepahaman tentang cara program dijalankan jika ini tidak berjalan dengan baik. Misalnya, jika kebijakan dari pusat tidak diterjemahkan dengan baik di tingkat daerah, maka bisa terjadi perbedaan dalam implementasi di setiap PKBM, yang menyebabkan ketidakseragaman dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.

Namun, disisi lain, Struktur birokrasi kelembagaan juga memiliki peran penting dalam menjamin keberlanjutan Program Kejar Paket C. Dengan adanya regulasi yang ketat, maka program ini dapat berjalan dengan standar yang jelas dan terukur. Selain itu, birokrasi yang terorganisir dengan baik dapat memastikan bahwa alokasi dana dan sumber daya lainnya dapat disalurkan secara tepat sasaran. Oleh karena itu, meskipun ada berbagai kendala dalam birokrasi, dalam sistem administrasi dan kebijakan dapat membantu meningkatkan efektivitas program tanpa mengurangi akuntabilitas yang diperlukan.

Secara keseluruhan, Struktur birokrasi kelembagaan memainkan peran ganda dalam implementasi Program Kejar Paket C, baik sebagai faktor pendukung maupun sebagai kendala. Di satu sisi,

regulasi yang jelas dapat menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan program, tetapi disisi lain, birokrasi yang terlalu kaku dapat menghambat fleksibilitas dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara pengawasan yang ketat dengan penyederhanaan prosedur administrasi agar program ini dapat berjalan lebih efektif. Dengan reformasi birokrasi yang tepat, Program Kejar Paket C dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan pendidikan alternatif.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Kejar Paket C di PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat

Implementasi atau pelaksanaan merupakan sebuah kebijakan atau program, yang bersangkutan dengan masyarakat publik ataupun masyarakat luas, maka akan selalu ada faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Faktor Pendukung

Dalam menganalisis terkait faktor pendukung implementasi kebijakan program kejar paket C di PKBM menggunakan teori Edward III yang mengacu pada empat variabel utama yaitu Komunikasi, sumberdaya, disposisi dan Struktur birokrasi kelembagaan. Faktor pendukung komunikasi menjadi sangat penting karena kebijakan akan berjalan efektif jika informasi yang disampaikannya jelas dan konsisten. Sosialisai kebijakan yang intensif dan berjenjang dari pemerintah pusat ke daerah hingga ke pengelola PKBM, adanya dukungan media lokal dan jaringan masyarakat dalam menyebarkan informasi tentang program kejar paket C, komunikasi atau koordinasi secara rutin antara dinas pendidikan

dengan pengelola PKBM.

Selain komunikasi faktor pendukung dengan adanya sumberdaya yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan program kejar paket C di PKBM. Sumber daya tidak hanya berupa finansial saja akan tetapi juga sangat penting sumberdaya manusia, fasilitas dan waktu. Sumberdaya yang mendukung diantaranya ada, tersedianya dana BOS atau bantuan operasional yang dikhususkan untuk PKBM, adanya tenaga pengajar yang kompeten dan berdedikasi tinggi, sarana prasarana yang memadai (ruang belajar, modul pembelajaran, akses internet, ruang perpustakaan, ruang tataboga, ruang tatabusana, ruang TIK, maupun lainnya). Selanjutnya faktor pendukung catatan atau sikap pelaksana, keberhasilan sangat bergantung pada komitmen dan motivasi pelaksana di PKBM untuk menjalankan program dengan baik.

Komitmen tinggi dari pengelola dan tenaga pengajar PKBM dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada warga belajar yang ingin menempuh pendidikan nya di PKBM. Kepedulian masyarakat bahwa berpandangan pentingnya pendidikan sehingga anak-anak ataupun masyarakat yang tidak bisa melanjutkan sekolah di sekolah formal dapat menempuh pendidikan di nonformal. Dukungan moral dari pemerintah ataupun dinas pendidikan dan tokoh masyarakat terkait keberhasilan program kejar paket C ini. Sebagai faktor pendukung selanjutnya Struktur birokrasi kelembagaan diantara adanya regulasi atau pedoman teknis yang jelas tentang implementasi program kejar paket C, mekanisme monitoring dan evaluasi yang secara rutin dan adanya sistem administrasi dan pelaporan yang

efisien di PKBM.

Faktor Penghambat

Kendala yang seringkali dihadapkan dalam implementasi kebijakan program kejar paket C di PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat sepeertihalnya berkitan dengan kendala komunikasi. Terkadang penyampaian komunikasi terkendala karena perbedaan pemahaman karena kemampuan orang menerima informasi atau Komunikasi itu berbeda-beda. Koordinasi antara PKBM dan suku dinas pendidikan masih perlu diperbaiki untuk mempercepat distribusi informasi, terkadang PKBM lambat dalam mengaplikasikan aturan atau kebijakan yang ada telah suku dinas pendidikan sampaikan. Bahkan dari Struktur birokrasi kelembagaan juga memiliki hambatan sepeertihalnya beberapa regulasi pusat tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang ada di PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat, kebijakan pusat yang sering berubah tanpa kesiapan ditingkat pelaksana. Meskipun ada hambatan-hambatan yang ada namun pengelola PKBM dan pihak- pihak terkait dalam pelaksanaan program kejar paket C ini selalu berusaha untuk menacri solusi agar program kejar paket C ini dapat berjalan dengan baik.

Diskusi

Temuan analisis mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan program kejar paket C di PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat. Berkaitan dengan implementasi kebijakan menurut teori Edward III adanya empat variabel penting yang saling berkaitan diantaranya ada, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan Struktur birokrasi kelembagaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Seputra, 2024).

Penelitian sebelumnya terkait implementasi kebijakan program paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng dipengaruhi oleh empat variabel yaitu Komunikasi, sumberdaya, catatan, dan Struktur birokrasi kelembagaan. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian berlokasi di Jakarta Pusat.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Pusat, Kepala Sekolah PKBM, Tenaga Pengajar PKBM dan Siswa kejar paket C di PKBM Negeri 23 Jakarta Pusat. Keberhasilan implementasi kebijakan kejar paket C ini dapat diukur dari tingkat kelulusan, partisipasi pihak-pihak yang terkait dalam implementasi kejar paket C, serta peningkatannya keterampilan siswa kejar paket C di PKBM. Berdasarkan data dari hasil wawancara responden tingkat kelulusan program kejar paket C ini berjalan dengan baik, sebagian besar siswa ada yang melanjutkan untuk ke dunia kerja dan bahkan ada yang melanjutkan kejejenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Faktor utama yang mendukung keberhasilan ini adalah fleksibilitas waktu belajar, metode pembelajaran yang lebih adaptif, serta dukungan dari tenaga pengajar yang berdedikasi. Selain itu, program bimbingan belajar tambahan dan penyediaan materi ajar digital juga turut membantu dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap mata pelajaran yang diajarkan. PKBM juga perlu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi agar dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas pendidikan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Kejar Paket C di PKBM Jakarta Pusat dan menemukan bahwa efektivitas program sangat dipengaruhi oleh faktor kebijakan, tenaga pengajar, fasilitas, serta partisipasi peserta didik. Keberhasilan program ini bergantung pada sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat dalam memberikan dukungan yang memadai. Program ini menjadi solusi bagi mereka yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, sekaligus membuka kesempatan bagi peserta didik untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh ijazah setara SMA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejar Paket C memiliki dampak positif dalam memberikan kesempatan kedua bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan mereka. Program ini tidak hanya membantu peserta didik memperoleh pengetahuan akademik, Dengan demikian, Kejar Paket C dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja di Indonesia. Namun, implementasi program ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga pengajar yang kompeten, minimnya sosialisasi program, serta rendahnya motivasi peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan mereka.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya peningkatan dalam aspek kebijakan, alokasi anggaran, serta penguatan peran tutor dan tenaga pengajar agar program dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran,

termasuk pengadaan fasilitas belajar yang lebih memadai, pelatihan bagi tenaga pengajar, serta penyediaan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, perlu adanya peningkatan kolaborasi antara PKBM.

Dampak dari implementasi kebijakan Kejar Paket C tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan, tetapi juga berpengaruh pada berbagai sektor lainnya, seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Dari sisi sosial, program ini dapat membantu mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Secara ekonomi, lulusan Kejar Paket C memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dari segi budaya, program ini turut mendorong kesadaran akan pentingnya pendidikan sepanjang hayat dan membangun budaya belajar di kalangan masyarakat. Dengan adanya perbaikan dan inovasi dalam implementasi kebijakan ini, diharapkan Kejar Paket C dapat semakin berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih berpendidikan, produktif, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Haqiqi, A. (2022). Implementasi Program Paket C dalam Pendidikan Kesetaraan di Indonesia. Jakarta: Pustaka Pendidikan.
- Hasviana, R. (2021). Pendidikan Kesetaraan dan Program Paket C: Peluang dan Tantangan. Bandung: CV. Media Edukasi.
- Lidya, S. (2024). Peran Pendidikan Nonformal dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah di Indonesia.

- Yogyakarta: Penerbit Nusantara.
- Mulyati, D. (2022). Strategi Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam Meningkatkan Kesetaraan Pendidikan. Jakarta: PT. Cerdas Mandiri.
- Noviani, R., et al. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan dalam RPJMN 2020-2024. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Oktaviani, L. (2023). Dinamika Pendidikan di Indonesia: Tantangan dan Peluang. Jakarta: Penerbit Ilmu Pendidikan.
- Pangestu, R. (2021). Program Kesetaraan Paket C: Alternatif Pendidikan bagi Masyarakat. Malang: Pustaka Rakyat.
- Rajaloea, T. (2023). Sistem Pendidikan Nasional dalam Perspektif Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Bandung: Pustaka Hukum.
- Seputra, A. (2024). Implementasi Kebijakan Program Paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng. Denpasar: Universitas Bali Press.
- Tawarika, N. (2024). Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Indonesia. Surabaya: Edupress.
- Utaminingsih, S. (2021). Kesetaraan Pendidikan dan Akses bagi Kelompok Marginal di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Sosial.
- Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan. Jurnal Pendidikan Nonformal, 10(1), 45-60.
- Mulyati, S. (2022). Pendidikan Nonformal sebagai Solusi Kesetaraan Pendidikan di Indonesia. Jurnal Pendidikan Alternatif, 8(2), 120-135.
- Oktaviani, R. (2023). Peran Pendidikan dalam Pembangunan Sosial: Perspektif Global dan Nasional. Jurnal Ilmu Pendidikan, 15(3), 200-215.
- Rajaloea, H. (2023). Kebijakan Pendidikan dalam RPJMN 2020-2024: Implementasi dan Tantangan. Jurnal Kebijakan Publik, 12(1), 75-90.
- Seputra, D. (2024). Implementasi Kebijakan Program Kejar Paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng. Jurnal Studi Kebijakan Pendidikan, 14(1), 90-110.
- Utaminingsih, T. (2021). Faktor Penghambat Partisipasi Pendidikan Tinggi di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Sosial, 9(3), 150-165.

Referensi Metodologi:

Artikel Jurnal:

- Lidya, R. (2024). Implementasi Program Kejar Paket C dalam
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N.K. (2012). Triangulation 2.0. Journal of Mixed Methods